Pengaruh Pembiayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2014-2023

Siti Lailatus Saidah[1], Muhammad Taufiq Hidayat[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
E-mail: sitiella63@gmail.com[1], taufikhidayat@untag-sby.ac.id[2]

Article History:
Received: 13 Januari 2025
Revised: 28 Februari 2025
Accepted: 08 Maret 2025

Keywords: *Pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dana pemerataan, bantuan sosial.*

Abstract: *Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Analisis kinerja keuangan secara umum dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis untuk sampai pada suatu posisi keuangan yang menggambarkan kinerja aktual dan kinerja potensial entitas di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan dan belanja bantuan sosial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Surabaya tahun 2014-2023. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan pendekatan kausal, data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan realisasi anggaran serta pendapatan pemerintah daerah kota Surabaya tahun 2014-2023 dianalisis menggunakan software SPSS versi 30.0 untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan daerah (X1) dan belanja bantuan sosial (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah kini menerapkan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah juga mengalami era baru sejak tahun 2000 yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terus diupayakan untuk meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan Pembangunan nasional (Nurhayati dan Hamzah, 2020). Langkah penting yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan perekonomian daerah dalam menghadapi era globalisasi ekonomi adalah dengan menerapkan strategi pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan data keuangan Kota Surabaya tahun 2022 dan 2023, dapat diidentifikasi fenomena kinerja keuangan daerah, terutama terkait optimalisasi pendapatan daerah, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta kesenjangan yang

signifikan antara defisit pada tahun 2022 dan surplus pada tahun 2023. Tantangan utamanya adalah menstabilkan keuangan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di Kota Surabaya. Pemerintah kota perlu mengembangkan strategi perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. (Pemerintah Daerah, 2022).

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014-2023

No.	Uraian	2022		2023	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	9.822.403.087.674,00	8.791.308.679.482,20	10.723.824.846.149,00	9.604.779.764.405,37
2	Belaja Operasi	8.625.723.584.781,00	7.679.441.144.733,50	8.760.559.740.322,00	7.858.879.310.450,50
3	Belanja Modal	1.998.526.419.610,00	1.766.030.466.528,00	2.026.075.212.273,00	1.671.895.816.185,00
4	Belanja Tak Te	11.015.000.000,00	1.702.578.492,00	33.449.300.000,00	12.815.776.299,00
5	Transfer/Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	1.562.588.930,00	1.062.588.930,00	1.250.000.000,00	-
8	Belanja Daerah	10.636.827.593.321,00	9.448.236.778.683,50	10.821.334.252.595,00	9.543.590.902.934,50
9	Surplus/Defisit	(814.424.505.647,00)	(656.928.099.201,30)	(97.509.406.446,00)	61.188.861.470,87
10	Pembiayaan	814.424.505.647,00	814.437.505.647,49	97.509.406.446,00	146.690.797.117,06
11	SILPA		157.509.406.446,19		207.879.629.117,06

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) Pemerintah Kota Surabaya, diolah penulis

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan dengan pengeluaran Belanja Daerah tahun 2022 lebih besar, maka Pemerintah Kota Surabaya mengalami defisit anggaran sebesar Rp656 miliyar, dimana realisasi pendapatan sebesar Rp8.79 triliun tidak mencukupi untuk menutupi belanja yang mencapai Rp9.44 triliun. Pada realisasi belanja operasional pada tahun 2023 sebesar Rp7.67 triliun jauh lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang hanya sebesar Rp946 miliar karena penekanan pada belanja operasional, yang mengindikasikan kurangnya investasi pada proyek-proyek jangka panjang yang penting untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti ingin mengetahui apakah Pengaruh dari Pembiayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2014-2023

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berhubungan dengan tiga aspek utama, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajer dan alat informasi bagi masyarakat. Dalam administrasi publik, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen, mulai dari perencanaan strategis, pengembangan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja**.** Informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, terutama untuk alokasi sumber daya (Mardiasmo, 2021).

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah menurut Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan data obyek pembiayaan daerah (PPRI No 12, 2023). Pembiayaan daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator besarnya nilai pada

penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah ukuran yang menggambarkan kompleksitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi tugas-tugas pemerintahan, baik dalam hal pelayanan publik maupun pengelolaan sumber daya. Ukuran mengacu pada area yang dicakup oleh otoritas lokal. Pemerintah daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan tingkat layanan yang lebih tinggi daripada pemerintah daerah dengan wilayah yang lebih kecil. (Jaka Winarna, 2024). Ukuran pemerintah daerah salah satu faktor yang menjadi pengukurannya adalah luas wilayah, total aset, serta rasio solvabilitas

Dana Perimbangan

Dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang paling penting untuk menjembatani kesenjangan keuangan antara negara bagian dan kotamadya, yang dapat diukur dengan jumlah dana perimbangan keuangan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. (Karso, 2021). Dana perimbangan dapat diukur melalui rasio dana perimbangan untuk melihat sebesara ketergantungannya pemerintah daerah terhadap pendapatan daerah tersebut.

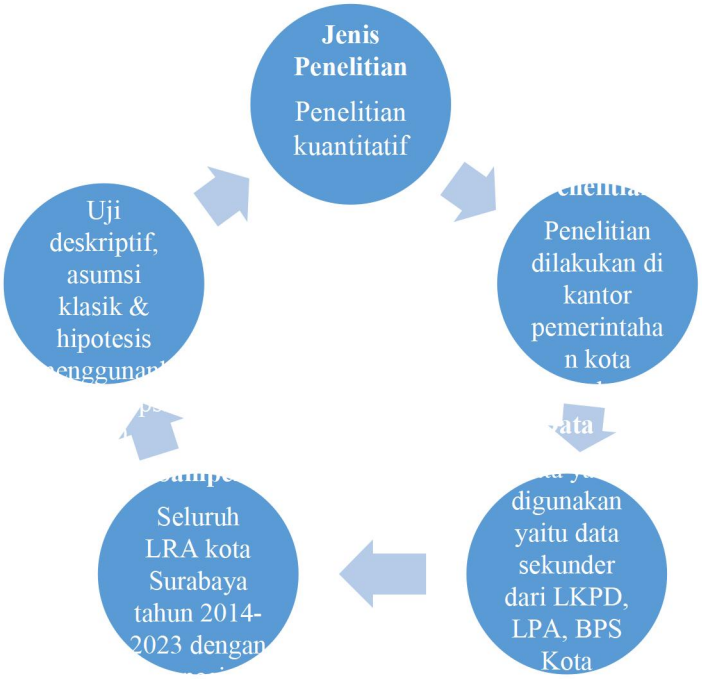
Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah belanja untuk memberikan bantuan langsung kepada individu atau kelompok yang membutuhkan di masyarakat, seperti bantuan tunai, bantuan makanan dan program kesejahteraan sosial lainnya. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Biaya bantuan sosial dapat diukur berdasarkan logaritma belanja sosial (Salomi Jacomina H, 2024). Belanja bantuan sosial dapat diukur berdasarkan tingginya nilai rasio belanja sosial untuk menunjukkan seberapa besar fokus pemerintah daerah terhadap kebutuhan sosial masyarakat dibandingkan dengan total belanja daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah penilaian kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya adalah evaluasi kinerja masa lalu melalui berbagai analisis untuk sampai pada posisi keuangan yang menggambarkan kinerja aktual dan potensial entitas di masa depan. Kinerja keuangan suatu daerah dapat dinilai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan pusat pelaporan yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab kepada entitas. Kepala satuan kerja bertanggung jawab untuk menyelenggarakan (Mahmudi, 2018)

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik

Tabel 2. Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Daerah	10	1.00	1.07	10.130	.02111
Ukuran Pemerintah Daerah	10	62.75	367.04	1.059.810	9.257.620
Dana Perimbangan	10	.21	.28	.2560	.02319
Belanja Bantuan Sosial	10	.00	8.19	21.560	314.973
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	10	1.22	1.83	15.460	.16119
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 2 Output SPSS di atas berjumlah 10 sample pada variabel independent dan dependen yang menunjukkan bahwa :

1. Variabel pembiayaan daerah (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 1.00 dan pada nilai maximum sebesar 1.07 sedangkan nilai rata-rata *(mean)* sebesar 10.130 dengan standar deviasi sebesar 0.02111
2. Variabel ukuran pemerintah daerah (X_2) yang memiliki nilai minimum sebesar 62.75 dan maximum senilai 367.04 sedangkan pada nilai rata-rata *(mean)* sebesar 105.9810 dengan standar deviasi senilai 92.57620
3. Variabel dana perimbangan (X_3) terdapat nilai minimum sebesar 0.21 dan 0.28 pada nilai maximum sedangkan pada rata-rata *(mean)* senilai 0.2560 dengan standar deviasi sebesar 0.02319

4. Variabel belanja sosial (X_4) terdapat nilai minimum sebesar 0.00 dengan nilai maximum sebesar 8.19 sedangan pada nilai rata-rata *(mean)* sebesar 2.1560 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.14973
5. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) yang memiliki nilai minimum 1.22 dan 1.83 pada nilai maximumnya sedangkan rata-rata *(mean)* senilai 1.5460 dengan standar deviasi senilai 0.16119

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Analisis Data Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08212025
Most Extreme Differences	Absolute	.208
	Positive	.208
	Negative	-.128
Test Statistic		.208
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan output SPSS yang disajikan pada Tabel 4.7, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data residual memiliki distribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov test, dimana nilai signifikansi sebesar 0,200 memenuhi kriteria distribusi normal, karena nilai tersebut lebih besar dari batas signifikansi 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Analisis Data Uji Multikolinieritas

Coefficientsa			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pembiayaan Daerah	.685	1.460
	Ukuran Pemerintah Daerah	.973	1.027
	Dana Perimbangan	.942	1.062
	Belanja Bantuan Sosial	.661	1.512
a Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memenuhi kriteria yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai variance inflation factor (VIF) yang lebih kecil dari 10,00 untuk masing-masing variabel

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Analisis Data Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38,604	24,532		1,574	0,176
	Pembiayaan Daerah	-30,129	24,115	-0,339	-1,249	0,267
	Ukuran Pemerintah Daerah	-0,010	0,005	-0,515	-2,263	0,073
	Dana Perimbangan	-54,419	18,719	-0,673	-2,907	0,034
	Belanja Bantuan Sosial	0,244	0,164	0,409	1,481	0,199
a. Dependent Variable: LN_RES						

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen sebagai berikut: variabel pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,176, variabel ukuran pemerintah daerah (X2) sebesar 0,267, variabel dana perimbangan (X3) sebesar 0,073 dan variabel belanja sosial (X4) sebesar 0,034. Nilai-nilai tersebut menunjukkan tingkat pengaruh masing-masing variabel terhadap model yang sedang diuji.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara kesalahan pengganggu. Adanya korelasi ini akan menyebabkan nilai kovarian tidak bernilai nol, Oleh karena itu, model yang baik haruslah bebas dari autokorelasi (Sulistyo, 2022). Kriteria pengujian autokorelasi yaitu:

a. Jika D<DL atau D>4-DL maka terjadi autokorelasi
b. Jika DU<D<4-DU maka tidak terjadi autokorelasi
c. Jika DL<D<DU atau 4-DU<D<4-DL maka tidak ada Kesimpulan

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Data Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.860[a]	0,740	0,533	0,11018	1,697
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah					

Sumber: Data diolah (2024)

Diketahui N = 10 dan K (Variabel Independen) = 4 Variabel

a. Nilai DL = 0.3760
b. Nilai DU = 2.4137
c. Nilai 4-DL = 3.624
d. Nilai 4-DU = 1.5863
e. Nilai DW = 1.697

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan kriteria uji Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar 2,4137 < 1,645 < 1,5863. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi pada model yang diuji, sehingga model regresi memenuhi asumsi independensi residual.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7. Uji Regeresi Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38,604	24,532		1,574	0,176
	Pembiayaan Daerah	-30,129	24,115	-0,339	-1,249	0,267
	Ukuran Pemerintah Daerah	-0,010	0,005	-0,515	-2,263	0,073
	Dana Perimbangan	-54,419	18,719	-0,673	-2,907	0,034
	Belanja Bantuan Sosial	0,244	0,164	0,409	1,481	0,199
a. Dependent Variable: LN_RES						

Sumber: Data diolah (2024)

Persamaan regresi berganda yang diperoleh dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Y = α + X1 + X2 + ε

Y = 2.715 + (-0.301)X1 + (-001)X2 + (-2.737)X3 +(-0.008)X4

1. Nilai konstanta sebesar 2,715 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen dianggap konstan atau nol, maka kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) diprediksi sebesar 2,715. Hal ini menunjukkan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah tanpa adanya pengaruh dari variabel lain.
2. Koefisien regresi untuk variabel ukuran pemerintah daerah (X1) yang dalam penelitian ini diukur dengan rasio solvabilitas anggaran adalah sebesar -0,301. Nilai negatif ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangannya. Dengan kata lain, peningkatan ukuran pemerintah daerah mengakibatkan penurunan kinerja keuangan.
3. Koefisien regresi variabel dana perimbangan (X3) sebesar -2,737 menunjukkan hubungan negatif antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya. Oleh karena itu, peningkatan matching fund dapat diasosiasikan dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah kota.
4. Koefisien regresi untuk variabel belanja sosial (X4) sebesar -0,008 menunjukkan bahwa belanja sosial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan belanja sosial cenderung menurunkan kinerja keuangan pemerintah kota.

Hasil Uji Hipotesis

Uji T (Uji Parsial)

Tabel 8. Hasil Analisis Data Uji T (Uji Parsia

Coefficientsa			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	14.769	.260
	Pembiayaan Daerah	-508	.633
	Ukuran Pemerintah Daerah	-7.507	.001
	Dana Perimbangan	-3.481	.018
	Belanja Sosial	.241	.819
a Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber: Data diolah (2024)

1. Berdasarkan tabel di atas, variabel dana perimbangan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,633 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana

perimbangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

2. Variabel ukuran pemerintah daerah (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).
3. Variabel Dana Perimbangan (X3), nilai signifikansi sebesar 0,018 yang juga lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, penelitian ini mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).
4. Variabel Belanja Sosial (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,819 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Belanja Sosial tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

Uji F (Simultan)

Tabel 9. Hasil Analisis Data Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA			
Model		F	Sig.
1	Regression	15.701	.005
	Residual		
	Total		
a Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji f (simultan) diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.005<0.05 maka pada penelitian ini variabel pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, belanja sosial berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji Koefisien Determinan (R2)

Tabel 10. Analisis Data Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860	.740	.533	.11018
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah				

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan output SPSS pada Tabel 4.6, nilai adjusted R-square sebesar 0,533 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan memberikan kontribusi sebesar 53,3% terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, 53,3% variasi kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model ini, sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Pembiayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pembiayaan daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t (uji parsial), dimana nilai signifikansi sebesar 0,892 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H1) ditolak, yang berarti variabel pembiayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Surabaya tahun 2014-2023 sampai batas tertentu. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa penggunaan pembiayaan daerah yang efektif belum optimal atau belum cukup signifikan untuk memberikan dampak yang nyata terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sofyan dan Syaiful Akbar, 2024) menunjukkan bahwa pembiayaan daerah tidak berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikarenakan SiLPA hanya terjadi jika ada surplus. Hal ini disebabkan pada pemerintah pusat menyalurkan alokasi dana SiLPA kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendanaan daerah untuk membiayai belanja modal atau pengeluaran pembiayaan daerah untuk mendukung program pembangunan daerah. Akibatnya, dampak pendanaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sangat kecil

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah (X2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Hal ini diperkuat dengan hasil uji t (uji parsial), dimana nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H2) diterima, yang berarti variabel ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Surabaya periode 2014-2023.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati dan Hamzah, 2020) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui besar kecilnya pemerintah daerah. Besar kecilnya pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang diperoleh daerah tersebut dalam setahun. Jika pemerintah tersebut besar, maka memungkinkan untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan komersial, yang akan memudahkan dalam pemberian pelayanan masyarakat yang memadai.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati et al., 2023), (Aafiah Millenia, 2022) dan (Aziz dan Kusumawati, 2024) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor “luas wilayah” bukanlah penentu utama kinerja keuangan di Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah belum mampu mengelola potensi daerah dengan baik

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parisal dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kota Surabaya tahun 2014-2023. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t (uji parsial) dimana nilai signifikansi sebesar 0.018 lebih kecil dari 0.05 maka H_3 diterima, artinya dalam penelitian ini secara parsial variabel (X_3) dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kota Surabaya tahun 2014-2023.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian (Padang dan Padang, 2023), (Ardelia et al., 2022) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Setiap peningkatan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Defitri et al., 2021) dan (Ihsan Wahyudin, 2020) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya pada pemerintah kota Malang dan Jogja

tahun 2014-2023

Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,98 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan dan belanja sosial secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardiyanti Pratika dan Nurhayati, 2022) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan penelitian dari n(Nasirwan et al., 2024) yang menyatakan bahwa secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pembiayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,98 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan dan belanja sosial secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardiyanti Pratika dan Nurhayati, 2022) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan penelitian dari n(Nasirwan et al., 2024) yang menyatakan bahwa secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di pemerintah kota Surabaya tahun 2014-2023, ukuran pemerintah daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di pemerintah kota Surabaya tahun 2014-2023, dana perimbangan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di pemerintah kota Surabaya tahun 2014-2023 dan belanja bantuan sosial (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di pemerintah kota Surabaya tahun 2014-2023. Secara simultan pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di pemerintah kota Surabaya tahun 2014-2023.

DAFTAR REFERENSI

Aafiah Millenia, N., 2022. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. J. Syntax Admiration 3, 786–803. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448

Ardelia, I.N., Wulandari, H.K., Ernitawati, Y., Dumadi, D., 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-

2020. J. Apl. Akunt. 7, 60–80. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165

Ardiyanti Pratika, A., Nurhayati, I., 2022. Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang. 5, 762–775. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2074

Aziz, A.A., Kusumawati, E., 2024. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. J. Soc. Sci. Res. 4, 84–95.

Defitri, S.Y., Fetrisia, S., Maison, W., 2021. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Ekonomia 11, 10–19.

Ernawati, Dirgantari, N., Pramono, H., Wibowo, H., 2023. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah,dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021. J. EK&BI 6, 245–256. https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i2.1178

Ihsan Wahyudin, H., 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. Indones. Account. Res. J. 1, 86–97.

Jaka Winarna, 2024. Informasi Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah. Deepublish.

Karso, A.J., 2021. BUKU AJAR HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH. Samudra Biru.

Mahmudi, A., 2018. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. J. Chem. Inf. Model. 53, 1689–1699.

Mardiasmo, 2021. Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru. Andi Offset.

Nasirwan, N., Ginting, A.B., Manalu, C., Sinaga, D.A., 2024. The Influence of Local Government Size and Economic Growth on Local Government Financial Performance. Econ. J. Econ. Bus. 3, 165–171. https://doi.org/10.56495/ejeb.v3i3.698

Nurhayati, N., Hamzah, A., 2020. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. J. Ekon. Akunt. Dan Manaj. 1, 22–34.

Padang, N.N., Padang, W.S., 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. J. Ris. Akunt. Keuang. 9, 303–318. https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985

Pemerintah Daerah, 2022. Catatan Atas Laporan Keuangan. Theor. Appl. Genet. 7, 1–7.

PPRI No 12, 2023. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2ol9 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Oxford English Dict*. https://doi.org/10.1093/oed/9600622025

Salomi Jacomina H, 2024. Akuntansi Sektor Publik.

Sofyan, A., Syaiful Akbar, F., 2024. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pembiayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Gerbang Kertosusila. Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah 6, 1276–1287. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.862

Sulistyo, A., 2022. Metode Penelitian Kuantitatif Dengan Pendekatan Statistika: (Teori, Implementasi & Praktik dengan SPSS). Penerbit Andi.